

DIALEKTIKA ELITE PESANTREN DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM LOKAL MADRASAH DI PESANTREN NURUL ISLAM 1 DAN AL-QODIRI 1 JEMBER

Imron Fauzi

*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Jl. Mataram No. 01 Kaliwates, Jember
imronfauzi@iain-jember.ac.id¹*

Abstract: *This study examines the elite dialectics of Nurul Islam 1 and Al-Qodiri 1 Jember Islamic Boarding School (pesantren) in developing their local curriculum. This study uses qualitative method. A number of data are collected through interview, observation, and documentary techniques. In analyzing the data, researcher uses data reduction, data display, and then find a conclusion. The researcher uses triangulation method in validating the data. The result of this study shows that the dialectics conducted by elites pesantren in developing local curriculum significantly developed through complementary dialogic way without changing national curriculum as well. The alternative ways in responding supervision and accreditation from the government, they made/served two forms of curriculum, namely national curriculum or government version curriculum and local curriculum or pesantren version curriculum. The dialectic inhibition factor is a guideline that still unclear, causes miscommunication in implementing it; local curriculum evaluates independently; and a complicated division of learning schedule, between activities in pesantren, curricular activities, and extracurricular activities at madrasah.*

Keywords: *dialectics, pesantren elite, local curriculum*

Pendahuluan

Fenomena madrasah formal di pesantren yang mengadopsi ilmu pengetahuan umum, namun masih tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab klasik, merupakan upaya untuk meneruskan tujuan utama lembaga pendidikan tersebut, yaitu mencetak calon ulama yang setiap kepada paham Islam tradisional.¹ Meskipun sebagai sub-sistem pendidikan Islam tradisional, pesantren dapat berperan aktif dalam perjuangan melawan keadilan sosial, ekonomi, dan kebudayaan.² Pesantren telah memberikan gaya tersendiri untuk arah pendidikan di nusantara. Eksistensinya mengikuti perkembangan dinamika masyarakat, serta dapat menjawab tantangan globalisasi dan tuntutan masyarakat sekitarnya, sehingga kehidupan pesantren selalu dinamis. Kritik yang ditujukan bahwa selama ini pesantren dicap sebagai tradisional dan tidak responsif, dapat dijawab oleh internal pesantren sendiri dengan berinovasi di beberapa bidang, khususnya kurikulum pendidikan yang diterapkan.³

Berdasarkan pemikiran diatas semacam itu, maka KH. Muhyiddin Abdusshomad sebagai pengasuh pesantren Nurul Islam I Jember dan KH. Achmad Muzakki Syah sebagai pengasuh pesantren Al-Qodiri 1 Jember yang dibantu oleh dewan pengasuh lain berinisiatif untuk mengembangkan kurikulum lokal pesantren secara lebih kreatif, inovatif, dan kompetitif. Para elite pesantren tersebut menginginkan para santrinya

¹ Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1998), hal. 95.

² Sholihah, "Peran ICT dalam Modernisasi Pendidikan Pondok Pesantren," *Cendekia: Journal of Education & Society*, Vol. 10, No. 1, (2012), DOI: <https://doi.org/10.21154/cendekia.v10i1.399>

³ Erma Fatmawati, "Integration of Islamic Boarding School and University: Typology Study and Curriculum of University Student Islamic Boarding School" *International Journal of Management and Administrative Sciences (IJMAS)*, Vol. 5, No. 10, (2018), <https://www.ijmas.org/vol-5-no-10-2018>

tidak hanya dibekali ilmu agama saja, namun juga ilmu dan keterampilan umum, serta tidak melupakan kearifan lokal yang ada sebagai kekhasan pada masing-masing pesantren.

Kurikulum madrasah di kedua pesantren tersebut merupakan perpaduan dari kurikulum lokal, kurikulum Kementerian Agama, dan kurikulum Al-Azhar. Kurikulum ini disusun agar para santri berkompeten dalam pembelajaran agama berbasis Kitab Kuning, penguasaan Sains, bahasa Arab dan Inggris, sekaligus internalisasi akidah dan amaliyah *Ahlussunnah wa al-Jama'ah*, melalui sistem pembelajaran berbasis *boarding school*, yakni santri harus tinggal di asrama dan terintegrasi dengan sistem pesantren.⁴ Selama ini memang pesantren kurang diberi kesempatan terlibat dalam pengembangan kurikulum nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, karena kurikulum, sistem, dan manajemenya dianggap berbeda dengan sekolah pada umumnya, sehingga mereka mengembangkan kurikulumnya sendiri serta mengadopsi komponen yang dianggap relevan dengan kebutuhan.⁵

Perpaduan kurikulum tersebut menjadikan sistem pendidikan pesantren tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga memusatkan pada pembentukan karakter sesuai dengan tuntutan globalisasi. Model pendidikan integratif di pesantren membuat semua kegiatan siswa sejak mereka bangun tidur hingga tidur lagi dikontrol oleh

⁴ Tim Redaksi, “*Sejarah MA Unggulan Nuris Jember*” <http://pesantrennuris.net/sejarah-ma-unggulan-nuris-jember/>, (diakses 03 September, 2018); dan “*Profil MA Al-Qodiri 1 Jember*” <https://maalqodiri1jember.sch.id/profil/> (diakses 20 Oktober, 2018).

⁵ Azam Othman dan Ali Masum, “Professional Development and Teacher Self-Efficacy: Learning from Indonesian Modern Islamic Boarding Schools” *Educational Process: International Journal*, Vol. 6, No. 2, (2017), DOI: 10.22521/edupij.2017.62.1

pengelola.⁶ Akan tetapi di lain pihak dengan masuknya sistem pendidikan madrasah modern ke dalam pesantren tersebut telah melahirkan problematika tersendiri yang berdampak pada nilai-nilai pengabdian masyarakat yang selama ini sudah dikembangkan. Berangkat dari masalah ini mengakibatkan sulitnya mencari santri yang ingin benar-benar belajar di pesantren karena ingin mempelajari ilmu agama, melainkan sekedar ingin mendapatkan selebar ijazah. Belum lagi masalah intervensi pemerintah yang terkadang pesantren harus terpaksa mengikuti setiap kebijakan pemerintah, demi mendapatkan legalitas dan tentunya bantuan finansial yang memadai. Berdasarkan beberapa hal diatas, akhirnya mengakibatkan rendahnya tingkat kemandirian pesantren dalam hal pengembangan.

Berbagai tantangan global, tuntutan kebijakan dan kebutuhan masyarakat, tentunya menjadi kendala dalam pengembangan kurikulum madrasah di pesantren, karena di sisi lain pesantren juga harus mempertahankan jati dirinya sendiri, sehingga diperlukan suatu strategi yang tepat agar madrasah di pesantren dapat menumbuhkan karakter, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu pada santrinya. Persoalan-persoalan tersebut merupakan agenda yang harus diselesaikan oleh elite pesantren, serta dicarikan solusinya melalui kekayaan yang dimiliki oleh pesantren itu sendiri yaitu tradisi (*turats/al-qadim al-shalih*).⁷ Warisan yang dimiliki oleh pesantren ini hendaknya dikaji ulang dan jangan sampai dilupakan, agar pesantren tetap berada pada nilai-nilai luhurnya.

⁶ Eka Septiarini Carolina, "Are Islamic Boarding Schools Ready? The Use of the Computer-Based Test in the National Exam Policy for English Subject" *Ta'dib: Journal of Islamic Education*, Vol. 22, No. 2, (2017), <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tadib/article/view/1638>

⁷ Abd. A'la, *Pembaharuan Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hal. 23.

Oleh karena itu, peran elite pesantren sebagai tokoh sentral sangat penting sebagai penentu kebijakan dan pengendali dalam mengatasi problematika tersebut.

Terkait dengan istilah elite pesantren ini, Arslan mengungkapkan bahwa kata elite berasal dari bahasa Latin “*eligre*” yang berarti memilih, dan akar kata yang sama “*electa*” yang berarti terpilih. Secara teoritis, elite dapat didefinisikan sebagai orang-orang yang memegang kekuasaan yang dilembagakan, mengendalikan seluruh sumber daya dan memiliki pengaruh yang signifikan pada proses pengambilan keputusan, bahkan mereka dapat mewujudkan keinginan mereka sendiri.⁸ Menurut Keller, elite adalah kelompok warga masyarakat yang memiliki kelebihan daripada warga masyarakat lainnya sehingga menempati kekuasaan sosial di atas warga masyarakat lainnya.⁹ Sehingga elite dapat dikatakan sebagai orang atau sekelompok orang yang memegang posisi terkemuka dalam suatu komunitas masyarakat. Kehadiran elite dalam kehidupan masyarakat menurut Bellamy melekat dengan watak sosial manusia, bahwa keunggulan watak moral biasanya menang dalam jangka panjang atas keunggulan jumlah dan kekuatan.¹⁰ Wedel juga mengatakan, elite dapat mempengaruhi dalam memadukan hierarki dan jaringan, berfungsi

⁸ D. Ali Arslan, “Elite Theory Applied to Contemporary Turkish Society,” *International Journal of Human Sciences*, Vol. 2, No. 2 (2015), <https://j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/25>

⁹ Suzanne Keller, terjemahan, *Penguasa dan Kelompok Elite*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 1997), hal. 5.

¹⁰ Richard Bellamy, terjemahan, *Teori Sosial Modern*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hal. 9.

sebagai penghubung, dan mengoordinasikan banyak jabatan atau posisi kekuasaan di dalam dan di luar struktur resmi.¹¹

Elite pesantren yang dimaksud dalam tulisan ini yaitu kiai sebagai elite utama dan dewan pengasuh lain sebagai elite pembantu. Kiai disebut juga sebagai “elite agama” atau “elite pesantren.” Dalam analisis Wahid, peran kiai yang strategis tersebut adalah sebagai agen budaya (*cultural broker*), bukan berarti sebagai makelar budaya. Peran kiai sebagai agen budaya memiliki peran ganda, satu sisi sebagai pengasuh, pemilik pesantren, pengayom ummat dan peneliti, di sisi lain, kiai sebagai asimilator kebudayaan luar yang masuk ke pesantren.¹² Itulah mengapa, Wahid menyitir pendapat Horikoshi bahwa peran sosial kiai menunjukkan daya dorong dan perubahan yang datang dari pemikiran keagamaan yang diiringi interaksi panjang dengan modernisasi.¹³

Mastuhu mengatakan struktur organisasi pesantren dapat digolongkan menjadi dua sayap sesuai dengan pembagian jenis nilai yang mendasarinya, yaitu nilai agama dengan kebenaran *absolut* dan nilai agama dengan kebenaran relatif. Sayap-1 menjaga nilai kebenaran *absolut*, dan Sayap-2 menjaga nilai kebenaran relatif, jadi bertanggung jawab pada pengamalan nilai kebenaran *absolut*, baik di dalam pesantren maupun di luar pesantren; sedangkan Sayap-1 bertanggung jawab pada kebenaran atau kemurnian ajaran agama. Sesuai dengan hierarki pembagian jenis nilai sebagaimana tersebut maka Sayap-1 mempunyai

¹¹ Janine R. Wedel, “From Power Elites to Influence Elites: Resetting Elite Studies for the 21st Century” *SAGE Journals*, Vol. 34 No. 5, (2017), DOI: doi/10.1177/0263276417715311

¹² Abdurrahman Wahid, “Pesantren Sebagai Subkultur” dalam M. Dawam Rahadjo (ed.), *Pesantren dan Perubahan*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hal. 46

¹³ Abdurrahman Wahid, “Pengantar” dalam Greg Fealy & Greg Barton (ed.), *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Pesantren-Kiai Langgar di Jawa*. (Yogyakarta: LkiS, 1997), hal. 9.

supremasi terhadap Sayap-2, dan oleh karena itu Sayap-2 tidak boleh bertentangan dengan Sayap-1, apalagi kalau sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar akidah-syari'ah agama dan sunnah pondok. Sayap-1 merupakan sumber informasi dan konfirmasi bagi Sayap-2 dalam melakukan tugasnya sehari-hari.¹⁴

Elite pesantren yang dimaksud penelitian ini adalah kelompok pemimpin, pembuat keputusan/kebijakan umum, pihak berpengaruh yang selalu menjadi sentral, dan yang satu sama lain melakukan koordinasi untuk menonjolkan perannya. Elite pesantren ini yaitu pengasuh atau kiai utama sebagai elite utama (Sayap 1), serta keluarga kiai, pengurus, dan kepala madrasah sebagai elite pendukung (Sayap 2) yang juga memiliki kekuasaan atas pesantren tersebut.

Penulis menemukan beberapa penelitian terkait dengan tema tulisan ini, seperti Affan (2016) yang mengungkapkan bahwa elite pesantren Karay Madura mempunyai persepsi positif terhadap globalisasi, bahkan elite pesantren tersebut bukan hanya mengajar santri tetapi juga membiayai semua kebutuhan pesantren, karena pesantren tidak ada Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan bantuan dari manapun, sebab pesantren tidak berada di bawah naungan pemerintah dan donatur manapun.¹⁵ Agusti, Kantun, dan Sukidin (2019) menguatkan bahwa keberhasilan pesantren dalam membentuk kelompok yang mandiri dari aspek ekonomi disebabkan karena mereka menjunjung tinggi rasa

¹⁴ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren (Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren)*, (Jakarta: INIS, 1994), hal. 74.

¹⁵ Moh. Affan, *Persepsi dan Peran Elite (Kiai) Pesantren terhadap Globalisasi (Studi Kasus atas Persepsi dan Peran Elite Pesantren Karay, Ganding, Sumenep, Madura)*, Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2016), <http://digilib.uin-suka.ac.id/22025/>

memiliki, keadilan, kebebasan, keseimbangan, solidaritas, serta kebersamaan yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.¹⁶ Ilahi (2014) juga mengungkapkan bahwa elite pesantren di Jawa beranggapan bahwa pesantren dapat diibaratkan sebagai suatu kerajaan kecil. Meskipun tinggal di pedesaan, mereka merupakan bagian dari kelompok elite dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Jawa. Para elite yang memimpin pesantren besar telah berhasil memperluas pengaruh mereka di wilayah negara, hasilnya mereka banyak yang diterima di elit nasional.¹⁷

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, masih terfokus pada otoritas kiai sebagai pemimpin pesantren, model hubungan antara kiai dan santri, serta usaha inovasi yang dilakukan pesantren untuk mempertahankan eksistensinya di tengah masyarakat. Namun, belum ada yang memfokuskan dialektika elite pesantren dalam pengembangan kurikulum lokal madrasah yang dikelola oleh pesantren, yang diintegrasikan dengan kurikulum nasional. Sehingga, selain menggunakan Teori Elite Suzanne Keller, penulis juga menggunakan teori Dialektika Relasional Baxter dan Montgomery.

Hubungan antara elite pesantren dengan pihak pemerintah dalam mengintegrasikan kurikulum nasional dan kurikulum lokal yang dirumuskan elite pesantren pasti mengalami berbagai kontradiksi. Dalam perspektif Teori Dialektika yang gagas oleh Leslie Baxter dan Barbara Montgomery. Asumsi dasar yang dibangun teori tersebut yakni: (1)

¹⁶ Agusti, Sri Kantun, Sukidin, "The Role of Islamic Boarding School on the Economic Empowerment of the Society (a Case Study at Islamic Boarding School Salafiyah Syafi'iyah Banyuputih Situbondo)", *International Journal of Research in Humanities and Social Studies*, Vol. 6, No. 3, (2019), <https://www.ijrhss.org/v6-i3>

¹⁷ Mohammad Takdir Ilahi, "Kiai: Figur Elite Pesantren," *Jurnal Nasional IBDA: Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 12, No. 2, (2014), <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/ibda/article/download/442/397/>

Hubungan tidak bersifat linear. Asumsi ini menyatakan bahwa sebuah hubungan terdiri atas keinginan-keinginan yang sifatnya kontradiktif sehingga sangat sulit untuk dapat mengatakan bahwa sebuah hubungan bersifat linear; (2) Hidup berhubungan ditandai dengan adanya perubahan-perubahan. Sebuah hubungan menurut asumsi ini selalu bergerak baik itu mengalami kemajuan maupun kemunduran; (3) Kontradiksi merupakan fakta fundamental dalam hidup berhubungan. Pada saat berhubungan, kontradiksi merupakan hal yang tidak dapat dihindari dan akan selalu ada serta menciptakan ketegangan antara keduanya. Ketegangan ini membuat hubungan membutuhkan komunikasi agar ketegangan dapat dikelola dengan baik dalam suatu hubungan; (4) Komunikasi sangat penting dalam mengelola dan menegosiasikan kontradiksi-kontradiksi dalam hubungan. Kontradiksi yang terjadi dalam hubungan tidak selalu bersifat negatif melainkan akan memberikan dampak yang positif bila dikelola dengan baik. Komunikasi menjadi salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengelola kontradiksi-kontradiksi tersebut oleh sebab itu komunikasi menjadi sangat dibutuhkan.¹⁸

Meskipun kurikulum nasional yang telah ditetapkan pemerintah wajib diselenggarakan di madrasah naungan pesantren Nurul Islam 1 dan Al-Qodiri 1 Jember, namun penulis melihat bahwa kiai sebagai pemimpin sentral serta kepala madrasah sebagai wakil kiai di madrasah dapat mengelola, membagi, dan mengembangkan kurikulum lokal yang ada secara baik, dengan tidak mengesampingkan kurikulum nasional. Realitanya justru lembaga-lembaga tersebut dapat mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik secara kuantitas maupun kualitas.

¹⁸ Baxter, dalam Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, terjemahan, *Teori Komunikasi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hal. 302.

Model pembelajaran yang diterapkan di kedua lembaga tersebut berlangsung secara *full day* dan *integrative* antara kegiatan di madrasah dan pesantren. Waktu belajar di pesantren lebih dari 12 (dua belas) jam sehingga membuat program pendidikan berbasis kurikulum terintegrasi sangat leluasa diterapkan.¹⁹ Kurikulum di pesantren didasarkan pada penerapan hukum Islam, metodologis, dan berlaku secara aplikatif dalam kehidupan publik.²⁰ Pengembangan kurikulum pesantren umumnya dilakukan sebagai respons positif dari aspirasi dan dinamika masyarakat, sebagai hasilnya, dan tindak lanjut dari integrasi antara organisasi pesantren dengan pemangku kepentingan masyarakat.²¹

Berangkat dari kenyataan tersebut, kurikulum madrasah yang dikembangkan oleh elite pesantren Nurul Islam 1 Jember dan Al-Qodiri 1 Jember sebagai bentuk integrasi antara kurikulum lokal dan kurikulum nasional tampaknya menjadi salah satu alternatif bagi peningkatan mutu pesantren melalui lembaga madrasah yang nantinya mengikis sistem salaf yang selama ini berkembang atau bahkan pembentukan lembaga formal yang dibentuk hanya sebagai bentuk formalitas belaka menjadi salah satu permasalahan yang menarik untuk diteliti, karena selama ini integrasi yang banyak dilakukan pesantren belum mampu menjadikan pesantren benar-benar sebagai suatu lembaga yang terbuka dan corak pemikirannya masih berdasar salafiyah ketimbang keterpaduan salaf dan khalaf ketika

¹⁹ Eliana Sari, "The Role Of Environmental Management Education in Islamic Boarding Schools in Preventing the Radicalism of Students In Indonesia," *International Journal of Education and Research*, Vol. 4 No. 7, (2016), <https://www.ijern.com/July-2016.php>

²⁰ Noorhaidi, "The Failure of the Transnational Campaign Wahhabi Islam and the Salafi Madrasa in Post-9/11 Indonesia". *South East Asia Research*, Vol. 18 No. 4, (2010), DOI: doi.org/10.5367/sear.2010.0015

²¹ Masduqi, "Deradikalisasi Pendidikan Islam Berbasis Khazanah Pesantren". *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 1, (2013), DOI: <http://dx.doi.org/10.14421/jpi.2013.21.1-20>

terjun di masyarakat. Selain itu, kenyataan semakin meningkatnya animo masyarakat sekitar untuk menyekolahkan anaknya. Masyarakat sekitar pesantren sebelumnya lebih memilih madrasah yang bercorak salaf murni, tetapi dengan keberadaan madrasah di kedua pesantren tersebut, mereka kemudian lebih memilihnya sebagai alternatif pendidikan lanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini menjadi penting dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan menemukan bagaimana dialektika elite pesantren dan pemerintah dalam pengembangan kurikulum lokal madrasah di Kabupaten Jember. Selain itu juga diharapkan dapat menemukan sebuah formulasi teori terkait dengan tema tersebut guna memperkaya khazanah keilmuan.

Metode

Penelitian ini dirancang dengan metode kualitatif, yang bersifat *deskriptive* dan *explorative*, dalam arti penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan latar alamiah,²² peneliti sendiri yang mencari makna,²³ dan lebih menekankan pada proses dari pada produk.²⁴ Jenis penelitian ini menggunakan studi kasus, yang sarannya berupa manusia, peristiwa, latar dan dokumen, kemudian sasaran tersebut ditelaah secara mendalam sebagai suatu totalitas, sesuai dengan latar atau konteksnya masing-

²² Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003), hal. 18.

²³ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1993), hal. 8.

²⁴ Robert C. Bogdan and Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (London: Allyn and Bacon Inc, 1992), hal. 29-32.

masing dengan maksud untuk memahami berbagai kaitan yang ada di antara variabel-variabelnya.²⁵

Subyek penelitian ini yaitu KH. Muhyiddin Abdusshomad sebagai elite utama pesantren Nurul Islam 1, dan KH. Ach. Muzakki Syah sebagai elite utama pesantren Al-Qodiri 1 Jember, yang keduanya dijadikan informan kunci. Untuk informan selanjutnya dipilih dengan teknik *purposive* yang terdiri dari dewan pengasuh, pihak Kementerian Agama, pengelola madrasah, serta masyarakat, dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumenter. Sedangkan prosedur analisis data melalui beberapa tahapan yaitu: *Data Condensation*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/Verifications*.²⁶

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan zaman, globalisasi, tuntutan kebijakan pemerintah, dan kebutuhan masyarakat, maka persoalan-persoalan yang dialami pesantren selama ini terkait dengan bagaimana mengintegrasikan antara kurikulum lokal sebagai jati diri pesantren tersebut dengan kurikulum nasional (kurikulum inti) yang diadopsi oleh madrasah formal yang dinaungi pesantren tersebut. Persoalan itu merupakan agenda yang harus segera diselesaikan oleh para elite pesantren, melalui kekayaan yang dimiliki oleh pesantren itu sendiri yaitu tradisi.²⁷ Warisan yang dimiliki oleh pesantren ini hendaknya dikaji ulang dan jangan sampai dilupakan,

²⁵ Robert K. Yin, terjemahan, *Studi Kasus Desain dan Metode*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 18; Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan* (Malang: Kalimasahada Press, 1996), hal. 57

²⁶ Mettew B. Miles, A. Michael Huberman and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, (Sage Publications, Inc., 2014), hal. 31-33

²⁷ A'la, *Pembaharuan Pesantren*, ... hal. 23.

agar pesantren tetap berada pada nilai-nilai kepesantrenan, namun juga tidak mengabaikan modernisasi.

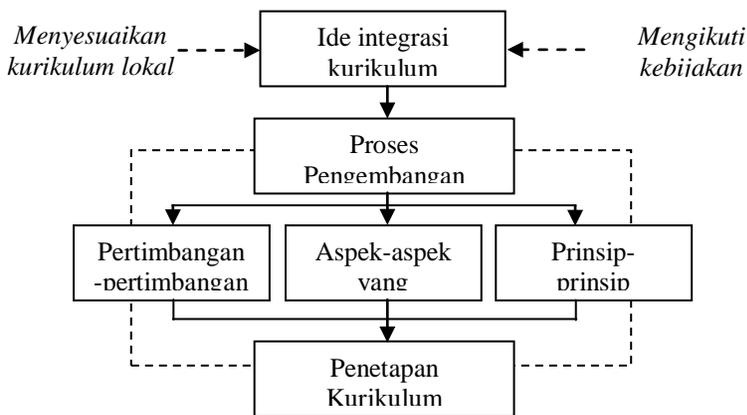
Implementasi Kurikulum 2013, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah dan ditindaklanjuti dengan adanya Surat Edaran Dirjen Pendis Nomor: SE/DJ.I/PP.00.6/1/2015, maka MI, MTs, dan MA di luar sasaran pendampingan, harus kembali menerapkan kurikulum 2006 atau KTSP untuk mata pelajaran umum dan tetap menerapkan Kurikulum 2013 untuk mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab, dengan mengacu pada KMA Nomor 165 Tahun 2014. Keputusan ini diambil sejak munculnya surat resmi yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 179342/MPK/KR/2014 tanggal 5 Desember 2014 tentang penghentian pelaksanaan kurikulum 2013.

Kurikulum KTSP 2006 itu sendiri berlaku berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi dan Permenag Nomor 2 Tahun 2008 Tentang SKL dan Standar Isi PAI dan Bahasa Arab.²⁸ Sedangkan implementasi Kurikulum 2013 berdasarkan Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI dan KMA Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab. Untuk menyusun struktur kurikulum kombinasi antara KTSP 2006 untuk Mata Pelajaran umum dan kurikulum 2013 untuk Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab, maka yang dibutuhkan adalah Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 dan KMA Nomor 165 Tahun 2014.

²⁸ Imam Bawani, *Pedoman dan Implementasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Surabaya: Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, 2007), hal. 56.

Atas dasar regulasi tersebut, madrasah yang diselenggarakan oleh pesantren juga menerapkan kurikulum yang sama dengan kurikulum di sekolah atau madrasah lain yang telah dibakukan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Berdasarkan landasan pemikiran semacam itu, KH. Muhyiddin Abdusshomad dan KH. Ach. Muzakki Syah, yang dibantu oleh elite pesantren lain berinisiatif untuk mengembangkan kurikulum lokal pesantren secara lebih kreatif dan inovatif. Mereka menginginkan para santrinya tidak hanya dibekali ilmu agama saja, namun juga ilmu dan keterampilan umum, serta tidak melupakan kearifan lokal yang ada sebagai kekhasan pesantren.²⁹

Berdasarkan penjelasan diatas untuk mengatasi persoalan tersebut para elite pesantren mengembangkan kurikulum lokal yang khas, integratif, teruji, namun tidak mengabaikan kurikulum nasional. Dialektika pengembangan kurikulum terpadu tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut ini.



Gambar 1.
Dialektika Pengembangan Kurikulum Madrasah
di Pesantren Nurul Islam 1 dan Al-Qodiri 1 Jember

²⁹ Diolah dari hasil wawancara dengan KH. Muhyiddin Abdusshomad, Pengasuh Pesantren Nuris 1 Jember (07 November, 2018); dan KH. Ach. Muzakki Syah, Pengasuh Pesantren Al-Qodiri 1 Jember, (21 Oktober, 2018).

Kurikulum inti yang diterapkan di kedua lembaga tersebut sebenarnya mirip dengan sistem pendidikan madrasah pada umumnya, hanya saja ditambah dengan beberapa Program Unggulan yang ditetapkan menjadi kekhasan lokal yang malah mendukung kurikulum nasional tersebut serta memfasilitasi pengembangan bakat masing-masing santri. Bentuk kurikulum lokal di MTS dan MA Nurul Islam 1 Jember, misalnya: (1) M-Sains (Madrasah Sains), (2) Seni, Keagamaan, dan Olahraga, dan (3) Pengembangan Bahasa Arab dan Inggris, (4) MHQ (Madrasah Huffadzul Qur'an), dan (5) MPKIS (Manajemen Pengembangan Kitab Kuning); dan (6) Program Go International dan *NSEP (Nuris Student Exchange Programme)*.³⁰ Kurikulum lokal yang dikembangkan di MTs dan MA Al-Qodiri 1 Jember, diantaranya: (1) Program Kitab Kuning (Amsilati), (2) Program Alquran (Tartilul Alquran), (3) Program Bahasa Inggris (IEC Program), dan (4) Program Bahasa Arab (PPBA). Serta ditambah dengan internalisasi nilai-nilai *Ahlussunnah Wal Jamaah* pada setiap materi pelajaran di semua jenjang pendidikan.³¹

Kurikulum lokal madrasah di pesantren Nurul Islam 1 Jember dan Al-Qodiri 1 Jember yang diterapkan sangat padat dengan muatan agama, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, serta pembelajaran yang intensif dengan sistem asrama (pesantren). Program yang diusung adalah program *tafaqquh fi al-din* (pendalaman ilmu agama). MTs dan MA Nurul Islam 1 dan MTs dan MA Al-Qodiri 1 Jember merupakan lembaga pendidikan formal berbasis pesantren yang berperan sebagai penyambung

³⁰ Diolah dari hasil dokumentasi di Yayasan Pesantren Nuris 1 Jember, (05 November 2018).

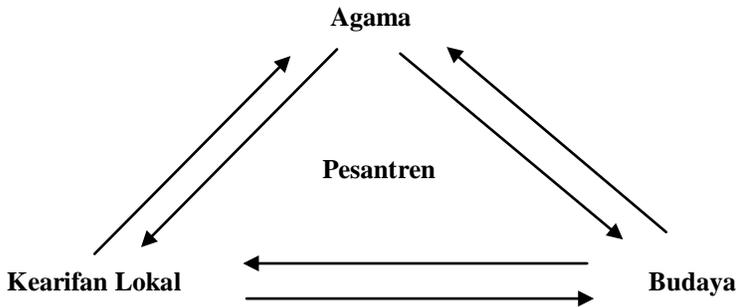
³¹ Diolah dari hasil dokumentasi di Yayasan Pesantren Al-Qodiri Jember, (21 Oktober 2018)

‘tradisi pesantren’ yang tujuannya adalah untuk ber-*tafaqquh fi al-din*, dengan *trade mark* dan unsur utamanya adalah mengkaji Kitab Kuning.

Keunikan program unggulan di kedua lokasi tersebut adalah desain kurikulum untuk program keagamaan menjadi 80% ilmu agama, dan 20% ilmu umum. Kekhasan kurikulum lokal ini tampak pada struktur kurikulum yang mengajarkan ilmu-ilmu agama dengan porsi yang lebih banyak daripada ilmu umum. Pelajaran agama Islam yang berbasis kitab kuning itu terdiri dari mata pelajaran Aqidah Akhlak, Qur’an Hadits, ilmu Tafsir, ilmu Hadits, Fiqih, Ushul Fiqih, Tasawwuf, Sejarah Peradaban Islam, dan Bahasa Arab. Dan sisanya adalah ilmu umum meliputi Pendidikan Kewarganegaraan, IPS, IPA, Bahasa Indonesia, Matematika, Pendidikan Jasmani, TIK, Kesenian, dan Bahasa Inggris.³²

Temuan tersebut sebenarnya senada dengan model Nadine Engel, yang menggambarkan adanya pola interaksi di dalam pesantren antara unsur agama, budaya, dan kearifan lokal. Nilai kearifan lokal di pesantren merupakan wujud dari proses interaksi yang panjang antara agama Islam yang diyakini dan budaya, kemudian terwujud dalam bentuk sistem, kebiasaan, bahasa, dan iklim organisasi. Pesantren dengan kearifan lokal yang berbentuk sistem nilai dan interaksi sosial yang dimilikinya merupakan ruang yang sarat makna karena terbentuk oleh kekuatan masyarakat pesantren sendiri dan bersumber dari agama.

³² Diolah dari hasil wawancara dengan Suhartadi, Waka. Kurikulum MTs Al-Qodiri 1 Jember, (16 Oktober 2018); dan Wahyutini Ekowati, Waka. Kurikulum MTs Nuris 1 Jember, (07 November 2018).



Gambar 2.
Pola Interaksi Agama, Budaya, dan
Kearifan Lokal di Pesantren³³

Pada saat proses dialektika pengembangan kurikulum lokal madrasah di pesantren Nurul Islam 1 dan Al-Qodiri 1 Jember mengalami beberapa hambatan. *Pertama*, pedoman pengembangan kurikulum selama ini yang kurang jelas. Dengan adanya pengembangan kurikulum lokal madrasah yang *notabene* menjadi keunggulan dan ciri khas pada masing-masing madrasah tersebut, kerap kali malah dinilai melanggar standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya ketika adanya supervisi berkala serta akreditasi, karena dianggap tidak sama dengan pedoman yang seharusnya dan madrasah pada umumnya. Sehingga seringkali terjadi *mis*-komunikasi antara elite pesantren dan pengelola madrasah dengan pihak Kementerian Agama Kabupaten Jember serta lembaga-lembaga formal di luar pesantren.³⁴

Kedua, evaluasi kurikulum lokal masih dilaksanakan secara mandiri. Karena kurangnya detailnya pedoman, sehingga khusus

³³ Diadaptasi dari Nadine Engels, et.al., "Principals in Schools with a positive School Culture". *Journal Published in Educational Studies*, Vol. 34, No. 3, (2008), DOI: doi/abs/10.1080/03055690701811263

³⁴ Diolah dari hasil wawancara dengan Helmi Emha, Kepala MA Al-Qodiri 1 Jember, (02 Oktober 2018); dan Hodlaifah, Kepala MTs Unggulan Nuris 1 Jember, (19 November 2018).

kurikulum lokal ini tidak adanya ujian akhir dari pihak Kementerian Agama. Jadi, program khusus ini diuji secara lokal dan diberi raport tersendiri. Ada sebagian santri yang kurang termotivasi untuk belajar dengan benar materi kurikulum lokal ini adalah karena tidak dimasukkannya dalam Ujian Akhir Madrasah, atau pra syarat kelulusan.³⁵ Evaluasi kurikulum lokal yang diterapkan secara mandiri ini, di samping sebagai keunikan dibanding dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Namun, juga dapat dikatakan sebagai hambatan, karena disebutkan dalam PP No. 19 Tahun 2005 *juncto* PP No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 63 Ayat (1) disebutkan, “Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: (a) Penilaian hasil belajar oleh pendidik; (b) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan (c) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.”

Ketiga, pembagian waktu belajar yang padat. Mengingat begitu banyaknya kegiatan keagamaan dan pembelajaran yang harus dilalui oleh santri di kedua lembaga tersebut baik pengajian di pesantren, kurikuler di madrasah, dan ekstrakurikuler tambahan lain yang sangat padat, sementara waktu yang tersedia begitu terbatas. Walaupun dengan waktu yang terbatas, juga dituntut untuk menyeimbangkan antara ilmu umum dan ilmu agama, antara kurikulum inti dan kurikulum lokalnya, serta antara program di madrasah dan di pesantren.³⁶

Alternatif solusinya yang dapat ditawarkan untuk mengatasi hambatan tersebut, diantaranya: *Pertama*, hendaknya pihak Kementerian

³⁵ Diolah dari hasil wawancara dengan Balqis Al-Humairo, Kepala MA Nuris 1 Jember, (13 November 2018); dan Moh. Wasis, Guru Fiqih di MTs Al-Qodiri 1 Jember, (18 Oktober 2018).

³⁶ Diolah dari hasil wawancara dengan Balqis Al-Humairo, Kepala MA Nuris 1 Jember, (13 November 2018); dan Ahmad Fikri, Guru di MA Al-Qodiri 1 Jember, (10 Oktober 2018).

Agama menyusun pedoman atau petunjuk teknis untuk pengembangan kurikulum lokal, khususnya bagi madrasah di bawah naungan pesantren, karena bagaimana pun setiap pesantren memiliki jati diri, kekhasan, kurikulum, atau *local wisdom* masing-masing yang tidak harus sama dengan standar pada umumnya; *Kedua*, hendaknya memberikan kekhususan dalam melaksanakan supervisi dan akreditasi kepada pihak madrasah di pesantren, karena selama ini mereka membuat 2 (dua) berkas administrasi, yang meliputi struktur kurikulum, jadwal pelajaran, sebaran mata pelajaran, pengorganisasian guru, dan sebagainya. Administrasi pertama untuk menanggulangi ketika ada kunjungan supervisor, sedangkan administrasi kedua disusun berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Jadi, alangkah baiknya mereka cukup mengembangkan 1 (satu) administrasi saja sebagaimana realitanya, sedangkan para supervisor menggunakan pedoman khusus ketika melakukan pengawasannya pada kedua lembaga ini.

Meskipun mengalami hambatan, hasil atau implikasi dari adanya pengembangan kurikulum lokal tersebut tidak dapat dipungkiri, diantaranya yakni sebagai pembuktian mutu pendidikan madrasah di pesantren kepada masyarakat, karena lulusan dari kedua lembaga ini cukup berprestasi, mampu berperan aktif, dan berinteraksi di tengah-tengah masyarakat serta bisa mengamalkan ilmunya meskipun ia tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.³⁷ Karena di madrasah ini dibekali beberapa pelajaran muatan lokal berbasis agama serta kegiatan-kegiatan lain.

³⁷ Beberapa prestasi santri madrasah di pesantren Nurul Islam 1 Jember dapat dilihat: <https://pesantrennuris.net/category/prestasi/>; dan Al-Qodiri 1 Jember dapat dilihat: <http://maalqodiri1jember.sch.id/prestasi/>

Selain hal-hal diatas, hilangnya kekhawatiran masyarakat terhadap keberlanjutan jenjang pendidikan selanjutnya setelah keluar dari kedua pesantren tersebut. Karena memang telah terbukti lulusan dari kedua lembaga ini telah diakui secara legal dan diterima di beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri, seperti: UGM Yogyakarta, Universitas Brawijaya Malang, UM Malang, Universitas Jember, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Maliki Malang, IAIN Tulungagung, IAIN Jember, bahkan hingga Universitas Umm al-Qurra Arab Saudi dan Universitas Al-Azhar Mesir.³⁸

Adanya proses dialektika, elite pesantren telah berjasa besar dalam menumbuhkan masyarakat swadaya dan swasembada, melalui pengembangan kurikulum lokal madrasahny. Penempatan pesantren sebagai pendidikan formal jalur madrasah yang dikembangkan pemerintah sebagai modernisasi pendidikan telah memudahkan ciri pesantren yang bebas, kreatif, berswadaya dan berswasembada.³⁹ Kekhawatiran tersebut sangat beralasan karena adanya sentralisasi dan birokratisasi pendidikan nasional serta campur tangan yang dilakukan pemerintah dalam urusan kepesantrenan.

Pada sisi lain pesantren semestinya membuka ruang baru dalam eksistensinya. Pesantren harus lebih inklusif terhadap realitas sosialnya. bermodal sikap terbuka ini, pesantren tetap bertahan sampai sekarang. Pesantren bukanlah komunitas agama yang eksklusif yang mengambil jarak dengan realitas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hidup menyendiri tak mau bersinggungan dengan komunitas lain, serta

³⁸ Diolah dari hasil wawancara dengan Robith Qoshidi, Wakil Ketua Yayasan Nuris 1 Jember, (30 September 2018).

³⁹ Abdul Munir Mul Khan, *Nalar Spiritual Pendidikan, Solusi Problem Filosofis Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yoga, 2002), hal. 180.

menghindari kebijakan pemerintah. Sikap terbuka tersebut bukan pula berarti semua perubahan dapat diterima oleh pesantren, namun elite pesantren harus benar-benar jeli dan ahli dalam mendialektikkan mana unsur yang harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan kebijakan pemerintah, serta mana yang harus dipertahankan sesuai *lokal wisdom*-nya sebagai identitas atau jati diri setiap pesantren tersebut.

Hasbi Indra mengatakan saat ini pesantren telah menjadi bagian pendidikan nasional, dan pesantren diproyeksikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Pesantren di masa depan sebaiknya memberikan wawasan kepada santri untuk berurusan dengan perspektif yang lebih luas dalam pengetahuan Islam, serta Sains dan teknologi, ekonomi, serta kewirausahaan untuk meningkatkan keterampilan hidup, sehingga dapat bersaing secara nasional maupun internasional.⁴⁰ Priyanto juga merekomendasikan pesantren harus berbenah diri dalam melaksanakan fungsi kependidikannya, terutama dalam hal yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum pendidikan pesantren. Salah satu model pengembangan kurikulum pesantren yang dapat dipertimbangkan implementasinya adalah bertumpu pada tujuan, pengembangan bahan pelajaran, peningkatan proses pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian yang *komprehensif*. Model pembelajaran dengan metode *sorogan* dan *bandongan* sebagai tradisi akademik di pesantren sebenarnya masih tetap relevan, namun perlu dikembangkan menjadi model *sorogan* dan *bandongan* yang dialogis.⁴¹

⁴⁰ Hasbi Indra, "Salafiyah Curriculum at Islamic Boarding School in the Globalization Era," *TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society*, Vol. 4, No. 1 (2017), DOI: <http://dx.doi.org/10.15408/tjems.v4i1.4960>

⁴¹ Dwi Priyanto, "Inovasi Kurikulum Pesantren (Memproyeksikan Model Pendidikan Alternatif Masa Depan)" *Jurnal Penelitian*, Vol. 4 No. 1, (2006), DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/jp.v12i1.4928>

Penulis menilai elite pesantren Nurul Islam 1 dan Al-Qodiri 1 Jember cukup piawai berdialektika dengan tesis sistem kurikulum yang ditawarkan pemerintah, sehingga dapat melahirkan sintesis sebagai konstruksi kurikulum madrasah baru yang khas ala pesantren. Elite pesantren dapat menyatu-padukan dan mengintegrasikan antara kurikulum nasional dan kurikulum lokal sekaligus. Betapa, elite pesantren adalah institusi yang paling kreatif dan inovatif. Berkat kreasi dan inovasi tersebut, pesantren merupakan institusi yang paling eksis hingga sekarang, bahkan banyak lembaga pendidikan yang menyerap sistem pendidikan pesantren yang dinilai memang telah teruji dan terbukti melahirkan manusia unggul: unggul moral, unggul intelektual, dan unggul sosial. Kehadiran berbagai nilai-nilai agama yang memberi bobot atas sejumlah karya pendidikan, ekonomi dan budaya pesantren. Nilai-nilai ini pula yang mulai diuji coba untuk diterapkan oleh institusi pendidikan lain, guna mencegah *degradasi* moral dan intelektual.

Sebagaimana Teori Dialektika Relational dari Baxter, proses dialektika yang dilakukan elite pesantren ini mengandung dimensi dialektis dan dialogis. Pola komunikasi yang dilakukan oleh elite pesantren dengan tidak secara frontal merubah kurikulum nasional, tetapi mengembangkannya dan mengintegrasikan dengan kurikulum lokal madrasah di bawah naungan pesantren, hal itu sebagai upaya meredakan konflik yang biasa terjadi antara pihak pesantren dan pemerintah terkait dengan pengembangan kurikulum ini. Pola komunikasi elite pesantren ini dianggap mampu untuk mengelola dan menegosiasikan kontradiksi yang selama ini terjadi.

Saat menyebutkan kata dialektis tidak dapat lepas dari dialektika Hegel yang berisi *thesis* (pro), *antithesis* (kontra), dan *synthesis* (solusi).

Baxter dan Montgomery mengungkapkan bahwa pendekatan monologis, dualistik, dan dialektik dapat digunakan untuk memahami visi dari setiap perilaku personal dan organisasi. Pendekatan monologis adalah pendekatan yang membingkai kontradiksi sebagai hanya/atau, sedangkan pendekatan dualistik adalah pendekatan yang membingkai kontradiksi sebagai dua bagian yang terpisah, dan yang terakhir pendekatan dialektik adalah pendekatan yang membingkai kontradiksi.⁴²

Realitas diatas mengindikasikan kemasyhuran madrasah di pesantren Nurul Islam 1 dan Al-Qodiri 1 Jember tidak dapat dilepaskan dari kontribusi elite pesantren sebagai kelompok orang yang menguasai dan mengajarkan ilmu agama di pesantren kepada para santri. Peranan elite pesantren diakui cukup efektif untuk pengembangan kurikulum lokal dan meningkatkan citra pesantren tersebut di mata masyarakat luas. Ketenaran pesantren biasanya berbanding lurus dengan nama besar kiainya terutama kiai pendiri pesantren sebagai elite utama. Partisipasi elite pesantren tidak hanya selaku guru yang mengajarkan agama tetapi juga menjadi figur pemimpin yang mampu mengarahkan para santri dan pendukungnya dalam menempuh jalan hidup dan kehidupan mereka sehari-harinya.

Simpulan

Dialektika elite pesantren Nurul Islam 1 dan Al-Qodiri 1 Jember dalam pengembangan antara kurikulum lokal dan kurikulum nasional saling menguatkan satu sama lain. Pihak pesantren tidak serta-merta merubah atau mengganti struktur kurikulum nasional yang telah

⁴² Richard West dan Lynn H. Turner. *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), hal. 234-235.

ditetapkan pemerintah. Begitu pula pihak Kementerian Agama, membolehkan untuk mengembangkan kurikulum lokal di tingkat yayasan selama tidak keluar dari pedoman atau kompetensi inti dan kompetensi dasar yang telah dirumuskan oleh Kementerian Agama.

Faktor penghambat dialektika elite pesantren dalam pengembangan antara kurikulum lokal tersebut, diantaranya: (1) Pedoman atau petunjuk teknis yang masih kurang jelas, sehingga mengakibatkan sering terjadinya multi-tafsir dan *mis*-komunikasi dalam tahap implementasi pengembangan kurikulum di tingkat lokal; (2) Evaluasi kurikulum lokal secara mandiri, sehingga muatan pelajaran dalam kurikulum lokal belum diakui secara nasional karena hanya diujikan oleh pihak madrasah dan dikembangkan raport secara sendiri; dan (3) Pembagian waktu pembelajaran yang sangat padat baik pengajian di pesantren, kurikuler di madrasah, dan ekstrakurikuler tambahan, menyebabkan adanya sebageian muatan pelajaran yang dikesampingkan dan membuat para santri kelelahan mengikutinya. Meskipun demikian, hasil dari dialektika dalam pengembangan kurikulum lokal madrasah tersebut tak dapat dipungkiri lagi, yaitu: (1) Sebagai bentuk pembuktian terkait dengan mutu pendidikan madrasah di pesantren kepada masyarakat yang tak kalah dengan lembaga lain; dan (2) Hilangnya kekhawatiran masyarakat terhadap keberlanjutan jenjang pendidikan selanjutnya setelah keluar dari pesantren. Sehingga *output* dan *outcome* dari pesantren benar-benar diakui kualitasnya baik agama maupun umum, serta dapat berdaya guna dan berdaya saing di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- A'la, Abd., *Pembaharuan Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006 .
- Affan, Moh., *Persepsi dan Peran Elite (Kiai) Pesantren terhadap Globalisasi (Studi Kasus atas Persepsi dan Peran Elite Pesantren Karay, Ganding, Sumenep, Madura)*, Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2016), <http://digilib.uin-suka.ac.id/22025/>
- Agusti, Sri Kantun, Sukidin, “The Role of Islamic Boarding School on the Economic Empowerment of the Society (a Case Study at Islamic Boarding School Salafiyah Syafi'iyah Banyuputih Situbondo)”, *International Journal of Research in Humanities and Social Studies*, Vol. 6, No. 3, (2019), <https://www.ijrhss.org/v6-i3>
- Arifin, Imron, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Social dan Keagamaan*, Malang: Kalimasahada Press, 1996.
- Arslan, D. Ali, “Elite Theory Applied to Contemporary Turkish Society,” *International Journal of Human Sciences*, Vol. 2, No. 2 (2015), <https://j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/25>
- Bawani, Imam, *Pedoman dan Implementasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Surabaya: Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, 2007
- Bawani, Imam, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, Surabaya: al-Ikhlash, 1998
- Bellamy, Richard, terjemahan, *Teori Sosial Modern*, Jakarta: LP3ES, 1990
- Bogdan, Robert C., and Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, London: Allyn and Bacon Inc, 1992
- Carolina, Eka Septiarini, “Are Islamic Boarding Schools Ready? The Use of the Computer-Based Test in the National Exam Policy for

English Subject” *Ta’dib: Journal of Islamic Education*, Vol. 22, No. 2, (2017), <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tadib/article/view/1638>

Engels, Nadine, et.al., “Principals in Schools with a positive School Culture”. *Journal Published in Educational Studies*, Vol. 34, No. 3, (2008), DOI: doi/abs/10.1080/03055690701811263

Fatmawati, Erma, “Integration of Islamic Boarding School and University: Typology Study and Curriculum of University Student Islamic Boarding School” *International Journal of Management and Administrative Sciences (IJMAS)*, Vol. 5, No. 10, (2018), <https://www.ijmas.org/vol-5-no-10-2018>

Hasbi Indra, “Salafiyah Curriculum at Islamic Boarding School in the Globalization Era,” *TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society*, Vol. 4, No. 1 (2017), DOI: <http://dx.doi.org/10.15408/tjems.v4i1.4960>

Ilahi, Mohammad Takdir, “Kiai: Figur Elite Pesantren,” *Jurnal Nasional IBDA: Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 12, No. 2, (2014), ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/ibda/article/download/442/397/

Keller, Suzanne, terjemahan, *Penguasa dan Kelompok Elite*, Jakarta: PT Rajawali Press, 1997

Littlejohn, Stephen W., dan Karen A. Foss, terjemahan, *Teori Komunikasi*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009

Masduqi, “Deradikalisasi Pendidikan Islam Berbasis Khazanah Pesantren”. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 1, (2013), DOI: <http://dx.doi.org/10.14421/jpi.2013.21.1-20>

Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren (Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren)*, Jakarta: INIS, 1994

- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Sage Publications, Inc., 2014
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1993
- Mulkhan, Abdul Munir, *Nalar Spiritual Pendidikan, Solusi Problem Filosofis Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2003
- Noorhaidi, "The Failure of the Transnational Campaign Wahhabi Islam and the Salafi Madrasa in Post-9/11 Indonesia". *South East Asia Research*, Vol. 18 No. 4, (2010), DOI: doi.org/10.5367/sear.2010.0015
- Othman, Azam dan Ali Masum, "Professional Development and Teacher Self-Efficacy: Learning from Indonesian Modern Islamic Boarding Schools" *Educational Process: International Journal*, Vol. 6, No. 2, (2017), DOI: [10.22521/edupij.2017.62.1](https://doi.org/10.22521/edupij.2017.62.1)
- Priyanto, Dwi, "Inovasi Kurikulum Pesantren (Memproyeksikan Model Pendidikan Alternatif Masa Depan)" *Jurnal Penelitian*, Vol. 4 No. 1, (2006), DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/jp.v12i1.4928>
- Sari, Eliana, "The Role Of Environmental Management Education in Islamic Boarding Schools in Preventing the Radicalism of Students In Indonesia," *International Journal of Education and Research*, Vol. 4 No. 7, (2016), <https://www.ijern.com/July-2016.php>
- Sholihah, "Peran ICT dalam Modernisasi Pendidikan Pondok Pesantren," *Cendekia: Journal of Education & Society*, Vol. 10, No. 1, (2012), DOI: <https://doi.org/10.21154/cendekia.v10i1.399>
- Tim Redaksi, "Profil MA Al-Qodiri 1 Jember" <https://maalqodiri1jember.sch.id/profil/> (diakses 20 Oktober, 2018)

Imron Fauzi: *Dialektika Elite Pesantren...*

Tim Redaksi, “Sejarah MA Unggulan Nuris Jember”
<http://pesantrennuris.net/sejarah-ma-unggulan-nuris-jember/>,
(diakses 03 September, 2018)

Wahid, Abdurrahman, “Pengantar” dalam Greg Fealy & Greg Barton
(ed.), *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Pesantren-Kiai
Langgar di Jawa*, Yogyakarta: LkiS, 1997

Wahid, Abdurrahman, “Pesantren Sebagai Subkultur” dalam M. Dawam
Rahadjo (ed.), *Pesantren dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES, 1998

Wedel, Janine R., “From Power Elites to Influence Elites: Resetting Elite
Studies for the 21st Century” *SAGE Journals*, Vol. 34 No. 5,
(2017), DOI: doi/10.1177/0263276417715311

West, Richard dan Lynn H. Turner, terjemahan, *Pengantar Teori
Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*, Jakarta: Salemba Humanika,
2008

Yin, Robert K., terjemahan, *Studi Kasus Desain dan Methode*, Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2002